PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Cicilia Alexcandra Magho
NPP. 33.0664

Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: sandramagho19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP.,M.Si
Email: rossylambelanova@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The author focuses on the problem of the uneven implementation of stunting reduction policies in Bajawa District, Ngada Regency. Although the prevalence of stunting in Ngada Regency has shown a declining trend, Bajawa District, as the administrative center of the regency, paradoxically recorded the highest number of stunted toddlers, with 139 cases as of August 2024. This condition indicates a gap between policy commitment, program availability, and the effectiveness of intervention implementation at the local level.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the local government in accelerating stunting reduction in Bajawa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach and applies Henry Mintzberg's Role Theory, which includes interpersonal, informational, and decisional roles. Data were collected through interviews, observation, and documentation.* ***Result:*** *The findings show that the role of the local government in accelerating stunting reduction has not been fully optimal. The interpersonal role has been carried out through the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team and cross-sectoral coordination, but coordination at the village level remains uneven. The informational role has been supported by the use of e-PPGBM and Elsimil data, yet the follow-up response to field data still tends to be slow. Meanwhile, the decisional role is reflected in budget allocation and several intervention programs, including local supplementary feeding, but the implementation of convergence programs still needs to be strengthened.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the role of the local government in accelerating stunting reduction in Bajawa District has been implemented, but it has not yet run optimally in terms of coordination, data-based response, and the effectiveness of intervention execution at the grassroots level.*

Keywords: *Government Role; Local Government; Policy Implementation; Stunting; Stunting Reduction*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan belum meratanya pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Meskipun prevalensi stunting Kabupaten Ngada menunjukkan tren penurunan, Kecamatan Bajawa sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan kabupaten justru mencatat jumlah balita stunting tertinggi, yaitu 139 balita pada Agustus 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan, ketersediaan program, dan efektivitas pelaksanaan intervensi di tingkat lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan dianalisis menggunakan Teori Peran Henry Mintzberg yang meliputi peran antarpribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting belum berjalan secara optimal. Peran antarpribadi telah dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan koordinasi lintas sektor, tetapi koordinasi di tingkat desa belum merata. Peran informasional telah didukung melalui pemanfaatan data e-PPGBM dan Elsimil, namun tindak lanjut terhadap data lapangan masih cenderung lambat. Sementara itu, peran pengambilan keputusan terlihat dari alokasi anggaran dan pelaksanaan sejumlah program intervensi, termasuk Pemberian Makanan Tambahan lokal, tetapi efektivitas pelaksanaan program konvergensi masih perlu diperkuat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal pada aspek koordinasi, respons berbasis data, dan efektivitas pelaksanaan intervensi di tingkat akar rumput.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pemerintah Daerah; Peran Pemerintah; Percepatan Penurunan Stunting; Stunting.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu indikator penting kegagalan pembangunan manusia karena dampaknya tidak berhenti pada rendahnya tinggi badan anak, tetapi merambat pada perkembangan kognitif, kerentanan penyakit, produktivitas masa depan, dan kualitas generasi (Victora et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, stunting tidak cukup dipahami sebagai urusan sektor kesehatan semata. Ia merupakan masalah lintas sektor yang membutuhkan keterpaduan kebijakan pangan, air bersih, sanitasi, pola asuh, pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan sosial, pendidikan keluarga, serta sistem data yang mampu menggerakkan

intervensi secara cepat (Lautt & Rahayu, 2024). Oleh sebab itu, keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengubah kebijakan menjadi tindakan yang bekerja pada level keluarga sasaran (Heidkamp et al., 2021).

Secara nasional, Indonesia telah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai agenda prioritas pembangunan. Kerangka regulasi nasional menempatkan pemerintah daerah sebagai simpul penting karena intervensi paling dekat dengan anak, ibu hamil, keluarga berisiko, posyandu, kader, desa, dan kelurahan berada di wilayah administrasi daerah (Supranoto et al., 2025). Namun, keberadaan regulasi dan program belum selalu menjamin penurunan kasus secara merata. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa masalah stunting kerap bertahan bukan karena program tidak ada, melainkan karena koordinasi lintas perangkat daerah lemah, data tidak cukup valid atau tidak segera ditindaklanjuti, keluarga sasaran tidak patuh terhadap pesan kesehatan, dan lingkungan hidup anak belum mendukung perbaikan status gizi (Rispati & Inizawati, 2023).

Konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan tantangan tersebut secara tajam. Data yang digunakan dalam skripsi menunjukkan prevalensi stunting NTT masih berada pada level tinggi, yaitu 35,3% pada tahun 2022, meningkat menjadi 37,9% pada tahun 2023, dan turun sedikit menjadi 37,0% pada tahun 2024. Pada saat yang sama, Kabupaten Ngada menampilkan pola yang tampak lebih positif karena prevalensi e-PPGBM menurun dari 9,3% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023 dan 8,3% pada tahun 2024. Penurunan di tingkat kabupaten tersebut, apabila dibaca secara agregat, dapat memberi kesan bahwa intervensi pemerintah daerah telah berjalan efektif.

Kesan keberhasilan agregat tersebut perlu diuji secara lebih kritis. Kecamatan Bajawa, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Ngada, justru mencatat jumlah balita stunting tertinggi pada tahun 2024, yaitu 139 balita dari 2.147 balita yang diukur. Kondisi ini membentuk anomali tata kelola: wilayah yang secara geografis paling dekat dengan pusat birokrasi, fasilitas koordinasi, dan perangkat pengambilan keputusan tidak otomatis menjadi wilayah dengan capaian terbaik (Mubarok et al., 2025). Temuan ini penting karena menantang asumsi umum bahwa kedekatan dengan pusat pemerintahan akan mempermudah akses layanan, mempercepat intervensi, dan memperkuat pengawasan program (Keats et al., 2021).

Artikel ini memosisikan anomali tersebut sebagai research gap. Sebagian studi stunting di Indonesia lebih banyak menyoroti determinan rumah tangga, pendidikan ibu, status sosial ekonomi, keragaman konsumsi pangan, praktik menyusui, sanitasi, atau karakteristik wilayah (Gusnedi et al., 2023; Laksono et al., 2022; Samosir et al., 2023; Siramaneerat et al., 2024). Kajian tersebut sangat penting, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menjalankan peran manajerialnya dalam menghubungkan data, koordinasi, keputusan, dan perubahan perilaku keluarga. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada pembacaan stunting sebagai persoalan tata kelola implementasi di tingkat lokal (Sari, 2023).

Penelitian ini menggunakan Teori Peran *Henry Mintzberg* sebagai kerangka analitis. Tiga kelompok peran yang digunakan adalah peran interpersonal, peran informasional, dan

peran pengambilan keputusan (Hermawan et al., 2026). Kerangka ini relevan karena percepatan penurunan stunting menuntut pemerintah daerah bukan hanya menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga penghubung antarpemangku kepentingan, pengelola informasi berbasis data, dan pengambil keputusan atas alokasi sumber daya. Pertanyaan utama artikel ini adalah bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa dan bagaimana program pemerintah daerah dijalankan untuk merespons tingginya kasus di wilayah tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada kesenjangan antara capaian penurunan stunting secara agregat di Kabupaten Ngada dan kenyataan masih tingginya jumlah balita stunting di Kecamatan Bajawa. Secara administratif, Bajawa merupakan pusat pemerintahan kabupaten sehingga secara logis wilayah ini seharusnya memiliki kedekatan dengan perangkat birokrasi, fasilitas koordinasi, pengawasan program, dan sumber daya kebijakan. Akan tetapi, data penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Bajawa justru mencatat 139 balita stunting pada Agustus 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kedekatan wilayah dengan pusat pemerintahan tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan intervensi stunting.

Kesenjangan tersebut penting karena penurunan prevalensi di tingkat kabupaten dapat menutupi konsentrasi masalah pada lokus tertentu. Kabupaten Ngada memang menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM, yakni dari 9,3% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023 dan 8,3% pada tahun 2024. Namun, capaian agregat tersebut belum menjawab mengapa sebagian wilayah, termasuk Kecamatan Bajawa, masih menyimpan jumlah kasus tinggi. Dengan demikian, masalah utama penelitian ini bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya program, tetapi pada bagaimana program, data, koordinasi, dan keputusan pemerintah daerah bekerja hingga tingkat keluarga sasaran.

Sebagian besar penelitian stunting di Indonesia lebih banyak menjelaskan faktor determinan rumah tangga, seperti pendidikan ibu, kondisi sosial ekonomi, pola konsumsi pangan, praktik menyusui, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan (Juniarti et al., 2025). Kajian tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai aktor penggerak konvergensi intervensi di tingkat lokal (Herawati & Sunjaya, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah akademik dengan menempatkan stunting sebagai persoalan tata kelola implementasi, khususnya dengan menganalisis peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian terdahulu mengenai stunting, determinan gizi anak, dan tata kelola intervensi kesehatan masyarakat. Laksono et al., (2022) meneliti stunting pada anak usia di bawah dua tahun di Indonesia dan menunjukkan bahwa pendidikan ibu memiliki kaitan penting dengan risiko stunting. Temuan tersebut menegaskan bahwa intervensi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengetahuan keluarga dan akses informasi kesehatan. (Siramaneerat et al., 2024) juga memperlihatkan bahwa determinan stunting berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik lokus secara lebih spesifik.

(Samosir et al., 2023) menekankan pentingnya keragaman konsumsi pangan dan status gizi anak usia 6-23 bulan. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa masalah stunting berhubungan dengan kualitas konsumsi dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak. (Fahmida et al., 2024) melengkapi temuan tersebut dengan analisis zat gizi bermasalah pada anak balita di wilayah prioritas stunting, sehingga intervensi pangan perlu berbasis kebutuhan gizi aktual dan bukan hanya pemberian bantuan makanan secara umum.

Kajian lain memperlihatkan pentingnya faktor sosial dan komunitas. (Mediani et al., 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi kader kesehatan berpengaruh terhadap pencegahan stunting. (Yunitasari et al., 2022) menggunakan pendekatan *mixed method* di pedesaan Indonesia dan menemukan bahwa stunting dipengaruhi oleh faktor keluarga, layanan, serta situasi sosial yang kompleks. Sementara itu, (Putri et al., 2024) menyoroti intervensi positive *deviance*/*hearth* melalui kolaborasi antara kader dan ibu untuk memperbaiki status gizi anak. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sektor, tetapi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan komunitas (Saharuddin et al., 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan dasar penting mengenai determinan dan intervensi stunting, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah daerah sebagai aktor penghubung antara data, koordinasi, keputusan, dan pelaksanaan intervensi (Indah & Asnil, 2026). Penelitian ini berbeda karena tidak hanya melihat stunting sebagai persoalan keluarga atau kesehatan, tetapi sebagai persoalan tata kelola implementasi di tingkat daerah. Dengan menggunakan Teori Peran *Henry Mintzberg*, penelitian ini membaca bagaimana pemerintah daerah menjalankan peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan dalam merespons anomali tingginya jumlah balita stunting di Kecamatan Bajawa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada cara membaca stunting sebagai persoalan tata kelola implementasi di pusat pemerintahan daerah. Penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan mengenai determinan gizi anak, kondisi keluarga, atau keberadaan program, tetapi menelaah bagaimana pemerintah daerah menjalankan peran manajerial dalam menghubungkan

koordinasi lintas sektor, sistem data, alokasi sumber daya, dan perubahan perilaku keluarga sasaran. Fokus pada Kecamatan Bajawa juga menghadirkan kebaruan konteks karena wilayah yang menjadi pusat pemerintahan justru mencatat jumlah balita stunting tertinggi.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan Teori Peran *Henry Mintzberg* untuk menjelaskan kebijakan stunting dalam konteks pemerintahan daerah. Penggunaan teori ini memberi sudut pandang yang berbeda karena peran pemerintah tidak hanya dipahami sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai penghubung antarpemangku kepentingan, pengelola informasi, penyampai pesan, pengalokasi sumber daya, dan pengambil keputusan terhadap hambatan implementasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan isu stunting, tata kelola lokal, dan teori peran manajerial pemerintah daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan memahami secara mendalam bagaimana Pemerintah Kabupaten Ngada menjalankan peran dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa. Pendekatan studi kasus dinilai tepat karena Kecamatan Bajawa menunjukkan kondisi khusus, yaitu menjadi pusat pemerintahan kabupaten namun tetap mencatat jumlah balita stunting tertinggi pada tahun 2024. Kondisi tersebut membutuhkan pembacaan kontekstual terhadap koordinasi, data, keputusan, dan pelaksanaan program di lapangan.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perhatian khusus pada Kelurahan Kisanata dan Desa Pape. Keduanya digunakan untuk melihat kontras lokus mikro dalam satu kecamatan. Kelurahan Kisanata tercatat memiliki 76 balita diukur dengan 0 balita stunting, sedangkan Desa Pape memiliki 48 balita diukur dengan 6 balita stunting atau 12,5%. Perbandingan ini membantu penulis membaca variasi capaian program dalam wilayah yang sama dan menilai bagaimana pemerintah daerah merespons perbedaan kondisi lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penelusuran informasi lapangan terhadap aktor yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Informan dipilih secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman langsung terhadap program. Informan kunci berasal dari unsur pemerintah daerah dan perangkat teknis yang berwenang dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program stunting, seperti Bapperida, Dinas

Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perangkat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, puskesmas, posyandu, kader, dan aktor pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen e-PPGBM, Elsimil, regulasi, dokumen program, data stunting, laporan kegiatan, dan dokumentasi lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai peran, hambatan, koordinasi, dan tindak lanjut program. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan kegiatan dan kondisi lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri data stunting, program, kegiatan, dan bukti pelaksanaan intervensi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari pemerintah daerah, perangkat teknis, kader, dokumen, serta hasil observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan dimensi Teori Peran *Henry Mintzberg*, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

Tabel 1. Kategori Informan dan Dasar Pemilihan

Kategori Informan	Peran dalam Penelitian	Teknik Pemilihan	Keterangan
Penentu kebijakan daerah	Menjelaskan arah kebijakan, komitmen, dan alokasi sumber daya	Purposive	Sekretaris Daerah/Kepala daerah terkait
Bapperida	Menjelaskan perencanaan, penganggaran, dan konvergensi program	Purposive	Koordinator perencanaan dan integrasi lintas OPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menjelaskan koordinasi TPK, Elsimil, dan keluarga berisiko	Purposive	Pelaksana teknis pencegahan hulu dan pendampingan keluarga
Dinas Kesehatan/Puskesmas/Posyandu	Menjelaskan intervensi gizi spesifik, data e-PPGBM, antropometri, dan PMT	Purposive	Pelaksana utama layanan kesehatan ibu-anak
Kader dan penerima manfaat	Menjelaskan penerimaan program, hambatan perilaku, dan praktik keluarga	Snowball	Kader, orang tua balita, atau keluarga sasaran

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa menggunakan Teori Peran Henry Mintzberg. Teori ini membagi peran manajerial ke dalam tiga kelompok, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran

pengambilan Keputusan (Indah & Asnil, 2026). Ketiga peran tersebut digunakan untuk membaca bagaimana Pemerintah Kabupaten Ngada membangun koordinasi lintas sektor, mengelola data, menyebarkan informasi, mengambil keputusan program, dan mengalokasikan sumber daya untuk menurunkan stunting. Sebelum membahas ketiga peran tersebut, perlu ditampilkan terlebih dahulu data dasar yang memperlihatkan anomali Kecamatan Bajawa.

Tabel 2. Tren Stunting NTT dan Kabupaten Ngada

Wilayah	2022	2023	2024
Provinsi Nusa Tenggara Timur	35,3%	37,9%	37,0%
Kabupaten Ngada	9,3%	8,4%	8,3%

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Tabel 3. Data Stunting Kecamatan Bajawa Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2024

Puskesmas	Balita Diukur	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Total Stunting	Persentase
Kota	991	21	42	928	63	6,4%
Surisina	662	18	19	585	37	5,9%
Langa	534	4	35	495	39	7,3%
Jumlah Kecamatan Bajawa	2.147	43	96	2.008	139	6,5%

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Data penelitian menunjukkan adanya dua lapis realitas. Di satu sisi, Kabupaten Ngada memperlihatkan tren penurunan prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM dari 9,3% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023 dan 8,3% pada tahun 2024. Di sisi lain, Kecamatan Bajawa sebagai pusat pemerintahan daerah justru mencatat jumlah balita stunting tertinggi, yaitu 139 balita dari 2.147 balita yang diukur. Kondisi tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka prevalensi kabupaten karena agregasi data dapat menyembunyikan konsentrasi masalah pada wilayah tertentu.

Anomali Bajawa memperlihatkan bahwa keberadaan fasilitas birokrasi dan kedekatan dengan pusat keputusan belum cukup untuk menjamin keberhasilan. Kecamatan Bajawa terdiri atas wilayah kerja Puskesmas Kota, Surisina, dan Langa. Jika dilihat dari jumlah kasus, Puskesmas Kota mencatat 63 balita stunting, Surisina 37 balita, dan Langa 39 balita. Angka ini menunjukkan perlunya pembacaan berbasis lokus, bukan hanya berbasis kabupaten.

3.1 Peran Interpersonal Pemerintah Daerah

Peran interpersonal Pemerintah Kabupaten Ngada tampak melalui kepemimpinan kepala daerah, koordinasi perangkat daerah, pelaksanaan rembuk stunting, pra-musrenbang tematik stunting, penggerakan TPPS, serta pelibatan kader dan mitra eksternal. Pemerintah daerah berupaya mempertemukan berbagai aktor, mulai dari Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskesmas, pemerintah desa/kelurahan, kader posyandu, PKK, hingga unsur swasta dan organisasi profesi.

Sebagai figur dan pemimpin, pemerintah daerah menunjukkan komitmen formal melalui pembentukan struktur percepatan penurunan stunting dan penyelenggaraan forum koordinasi (Erlyn et al., 2021). Sebagai penghubung, pemerintah daerah menghubungkan program kesehatan dengan dukungan lintas sektor, misalnya air bersih, bantuan sosial, pangan keluarga, dan dukungan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan struktural tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi hubungan sosial yang kuat pada level keluarga. Sebagian keluarga sasaran masih memerlukan pendekatan interpersonal yang lebih intensif agar pesan gizi, pola asuh, dan sanitasi tidak berhenti sebagai imbauan.

Kelemahan utama peran interpersonal terletak pada jarak antara koordinasi formal dan penerimaan keluarga (Sari, 2023). Rapat, regulasi, dan struktur tim memang penting, tetapi belum cukup jika kader, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa tidak memiliki waktu, sumber daya, serta strategi komunikasi yang mampu menembus kebiasaan keluarga. Hal ini selaras dengan studi (Wiliyanarti et al., 2022) dan (Mediani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa budaya keluarga, dukungan sosial, dan motivasi kader memengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi anak.

3.2 Peran Informasional Pemerintah Daerah

Peran informasional pemerintah daerah terlihat pada penggunaan data e-PPGBM, pemantauan posyandu, audit kasus stunting, Elsimil, dan dokumentasi keluarga berisiko. Data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi balita stunting, memetakan lokus, menilai kebutuhan intervensi, serta mengarahkan program perangkat daerah. Dalam konteks Bajawa, data menjadi instrumen penting karena menunjukkan bahwa angka kabupaten yang menurun tidak menghapus konsentrasi kasus di tingkat kecamatan dan desa.

Meskipun demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya celah antara pemantauan data dan respons intervensi. Data yang sudah tersedia belum selalu diikuti tindakan cepat, terutama ketika masalah yang ditemukan berkaitan dengan perilaku keluarga, sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan. Pemerintah juga menemukan kebutuhan pengadaan dan kalibrasi alat antropometri karena akurasi pengukuran berpengaruh terhadap validitas data. Tanpa data yang valid, program berisiko salah sasaran; tanpa tindak lanjut yang cepat, data hanya menjadi arsip administratif.

Peran penyebar informasi juga dijalankan melalui edukasi 1000 HPK, kelas ibu hamil dan ibu balita, program Bina Keluarga Balita, gerakan aksi bergizi, pemberian tablet tambah darah, serta sosialisasi visual seperti stiker dan pesan pencegahan stunting. Namun, tantangan terletak pada internalisasi pesan. Keluarga tidak selalu mengubah praktik hanya karena informasi telah disampaikan. Karena itu, peran informasional perlu bergerak dari sekadar penyuluhan menuju komunikasi risiko yang berulang, personal, dan berbasis kondisi keluarga (Hamzah et al., 2024).

3.3 Peran Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah

Peran pengambilan keputusan terlihat dari inisiatif program PMT lokal, penguatan Bina Keluarga Balita, pemanfaatan Elsimil, pengadaan antropometri, Rembuk Stunting, BAAS, serta kolaborasi dengan organisasi profesi dan pihak eksternal. Pemerintah daerah tidak hanya mengambil keputusan administratif, tetapi juga mencoba mengembangkan inovasi berbasis pangan lokal dan dukungan sosial. Di Desa Pape, misalnya, PMT lokal diarahkan pada pemanfaatan sumber pangan setempat seperti kelor, ubi, telur, ikan air tawar, dan olahan menu yang lebih mudah diterima anak.

Namun, keputusan program masih menghadapi batas efektivitas. PMT lokal dapat membantu perbaikan asupan, tetapi dampaknya akan terbatas apabila sanitasi buruk, akses air bersih tidak memadai, rumah tidak sehat, atau keluarga tidak konsisten menjalankan pola pemberian makan. Studi (Fahmida et al., 2024; Keats et al., 2021; Samosir et al., 2023), menguatkan bahwa pemenuhan zat gizi perlu dibaca bersama ketahanan pangan, kualitas diet, dan lingkungan pendukung.

Peran pengalokasi sumber daya juga belum sepenuhnya stabil. Pelaksanaan di desa masih dipengaruhi konsistensi Dana Desa, kapasitas kader, dan prioritas program lokal. Pada titik ini, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme supervisi agar alokasi anggaran tidak hanya muncul dalam dokumen, tetapi benar-benar menjawab keluarga sasaran berdasarkan data *by name by address* (Kusumawardani et al., 2024). Pemerintah daerah juga perlu menjadi negosiator yang lebih aktif dengan swasta, BUMN/BUMD, organisasi profesi, dan lembaga sosial agar intervensi tidak bergantung pada satu sumber Anggaran (Zhang & Wang, 2023).

Tabel 4. Operasionalisasi Konsep Peran Pemerintah Daerah

Konsep	Dimensi	Indikator	Makna Analitis dalam Artikel
Peran Pemerintah Daerah	Interpersonal	Figurehead, leader, liaison	Kapasitas pemerintah membangun kepemimpinan, simbol komitmen, dan hubungan kerja lintas sektor sampai tingkat desa/kelurahan.
Peran Pemerintah Daerah	Informasional	Monitor, disseminator, spokesman	Kapasitas pemerintah memantau data stunting, menyebarkan informasi, dan mengubah data menjadi tindakan serta pesan kesehatan.
Peran Pemerintah Daerah	Pengambilan Keputusan	Entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator	Kapasitas pemerintah menetapkan inovasi, menangani hambatan, mengalokasikan sumber daya, dan bernegosiasi dengan aktor eksternal.

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

3.4 Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting

Program pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori besar: intervensi spesifik, intervensi sensitif, intervensi hulu, serta tata kelola dan inovasi kolaboratif. Pengelompokan ini lebih sesuai untuk artikel jurnal karena menghindari daftar kegiatan yang terlalu panjang dan membantu pembaca melihat logika kebijakan secara sistematis (Supadmi et al., 2024).

Tabel 5. Matriks Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Kategori	Program/Kegiatan	Tujuan	Catatan Analitis
Intervensi spesifik	PMT lokal, posyandu, pengukuran antropometri, tablet tambah darah, kelas ibu hamil/ibu balita	Memperbaiki asupan, pemantauan pertumbuhan, dan layanan kesehatan ibu-anak	Efektif jika disertai kepatuhan keluarga dan pengukuran valid.
Intervensi sensitif	Sanitasi, air bersih, edukasi lingkungan, pesan visual STOP STUNTING	Mengurangi faktor lingkungan yang memperburuk status gizi	Masih menjadi hambatan penting terutama pada lokus rentan.
Intervensi hulu	Elsimil, edukasi calon pengantin, remaja, dan keluarga berisiko	Mencegah risiko sejak sebelum kehamilan dan 1000 HPK	Perlu integrasi data dengan kunjungan keluarga dan pendampingan TPK.
Tata kelola dan inovasi	TPPS, Rembuk Stunting, RDS, BAAS, kalibrasi antropometri, kolaborasi eksternal	Menguatkan koordinasi, data, dan dukungan sumber daya	Perlu pengawasan agar forum tidak berhenti sebagai formalitas.

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Tabel 6. Kontras Lokus Mikro: Kelurahan Kisanata dan Desa Pape

Lokus	Data/Temuan Utama	Makna Tata Kelola	Implikasi Program
Kelurahan Kisanata	76 balita diukur; 0 balita stunting dalam data 2024	Menunjukkan potensi keberhasilan bila pencegahan, pemantauan, dan respons berjalan baik	Model praktik baik perlu ditelusuri lebih lanjut dan direplikasi secara hati-hati.
Desa Pape	48 balita diukur; 6 balita stunting; 12,5%	Menunjukkan kerentanan mikro meskipun berada dalam kecamatan pusat pemerintahan	Perlu penguatan PMT lokal, sanitasi, air bersih, kunjungan rumah, dan dukungan Dana Desa.

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

3.5 Pembahasan Anomali Tata Kelola Stunting di Kecamatan Bajawa

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pusat pemerintahan tidak otomatis menjadi pusat keberhasilan intervensi. Bajawa memiliki kedekatan dengan birokrasi kabupaten, tetapi tetap mencatat jumlah balita stunting tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak selesai melalui kedekatan geografis, melainkan melalui kualitas tata kelola implementasi. Dalam perspektif Mintzberg, masalahnya terletak pada belum terhubungnya peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan secara utuh (Syahri et al., 2024).

Anomali ini juga memperlihatkan keterbatasan indikator agregat. Penurunan prevalensi Kabupaten Ngada dapat menjadi capaian penting, tetapi tidak boleh menutup fakta bahwa terdapat konsentrasi kasus di Bajawa. Apabila pemerintah hanya membaca angka kabupaten, risiko kebijakan adalah rasa puas terlalu cepat (Kusumajaya et al., 2023). Analisis berbasis lokus menunjukkan perlunya intervensi yang lebih presisi pada desa/kelurahan dan keluarga sasaran. Pendekatan semacam ini sejalan dengan (Laksono et al., 2024), yang menekankan pentingnya penentuan target kebijakan secara tepat untuk menurunkan stunting pada komunitas rentan.

Sistem data seperti e-PPGBM dan Elsimil dapat memperkuat pemerintahan berbasis bukti. Namun, nilai data terletak pada tindak lanjutnya. Dalam penelitian ini, pemantauan data sudah berjalan, tetapi respons pasca-pemantauan masih menghadapi kelambatan dan ketidaksinkronan. Data tentang balita stunting, calon pengantin, ibu hamil, atau keluarga berisiko perlu diterjemahkan ke dalam kunjungan rumah, konseling spesifik, perbaikan lingkungan, dan dukungan pangan yang tepat sasaran.

Kesenjangan data-tindakan sering terjadi karena data dikelola oleh satu sektor, sedangkan penyebab stunting tersebar di banyak sektor (Sapri et al., 2026). Jika data gizi berada di Dinas Kesehatan, tetapi masalah utama keluarga adalah air bersih, jamban, ketahanan pangan, atau literasi ibu, maka respons harus melibatkan perangkat daerah lain. Di sinilah peran Bapperida dan TPPS menjadi kunci. Mereka tidak hanya menyusun rencana, tetapi harus memastikan bahwa data menjadi basis alokasi sumber daya lintas sektor.

PMT lokal, BAAS, dan bantuan pangan merupakan intervensi penting, tetapi tidak boleh dipahami sebagai solusi tunggal. Bantuan pangan dapat memperbaiki asupan dalam jangka pendek, sedangkan stunting merupakan akibat akumulasi kerentanan dalam waktu panjang. Apabila anak menerima PMT tetapi keluarga tidak memiliki air bersih, sanitasi layak, rumah sehat, praktik pengasuhan memadai, atau akses layanan yang konsisten, maka dampak PMT berisiko tidak maksimal.

Studi-studi terbaru tentang diet anak dan intervensi gizi mendukung argumentasi ini. (Fahmida et al., 2024) menunjukkan pentingnya kecukupan zat gizi bermasalah pada anak balita di wilayah prioritas stunting. (Samosir et al., 2023) menekankan peran keragaman konsumsi pangan. (Pardamean et al., 2024) memperlihatkan potensi program suplementasi berbasis ikan, tetapi program semacam itu tetap membutuhkan pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, inovasi PMT lokal Desa Pape dapat menjadi kekuatan apabila ditempatkan dalam paket intervensi yang lebih luas.

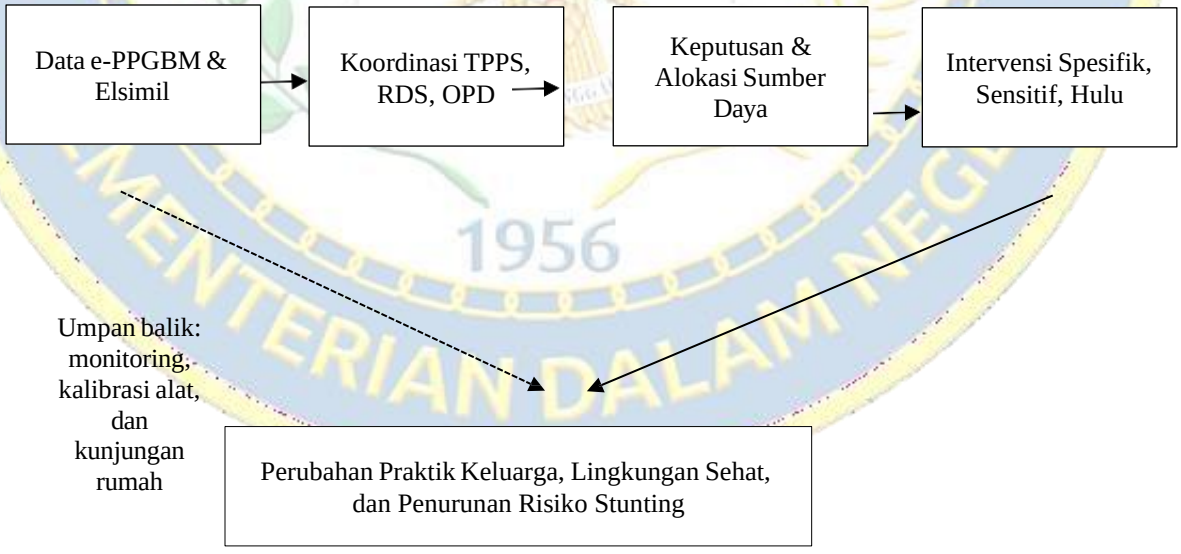
Perubahan perilaku keluarga merupakan arena paling sulit dalam penurunan stunting. Pemerintah daerah dapat menetapkan program, tetapi praktik makan, kebersihan, kunjungan posyandu, pemberian ASI, kepatuhan minum tablet tambah darah, dan perawatan anak berlangsung di rumah. Dengan demikian, kader posyandu, TPK, PKK, dan pemerintah desa/kelurahan menjadi aktor penghubung yang menentukan apakah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi praktik.

Literatur mendukung pentingnya aktor komunitas, (Mediani et al., 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi kader berpengaruh pada pencegahan stunting. (Putri et al., 2024) menekankan kolaborasi pekerja kesehatan komunitas dan ibu dalam pendekatan positive *deviance/hearth* (Chapman et al., 2024). juga menunjukkan perlunya protokol intervensi yang peka budaya. Dalam kasus Bajawa, penguatan kader tidak cukup melalui pelatihan teknis; kader juga memerlukan dukungan logistik, pengakuan sosial, dan mekanisme supervisi yang konsisten.

Kontribusi teoritis artikel ini adalah memperluas penggunaan Teori Peran *Mintzberg* ke dalam studi tata kelola stunting. Teori ini membantu menjelaskan bahwa kegagalan atau keberhasilan program bukan hanya hasil dari ada atau tidaknya kebijakan, tetapi dari hubungan antarperan pemerintah. Peran interpersonal tanpa data yang akurat akan menghasilkan koordinasi simbolik (Andriani et al., 2025). Peran informasional tanpa keputusan cepat akan menghasilkan administrasi data. Peran pengambilan keputusan tanpa komunikasi keluarga akan menghasilkan program yang tidak sepenuhnya diterima sasaran.

Dengan kerangka tersebut, *novelty* artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan dan kelengkapan struktur kebijakan tidak otomatis menjamin efektivitas penurunan stunting apabila peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan pemerintah daerah tidak terkoneksi sampai pada level rumah tangga. Novelty ini memperkuat pemahaman bahwa stunting merupakan persoalan tata kelola implementasi yang harus dibaca dari relasi antara data, koordinasi, keputusan, lingkungan, dan perilaku keluarga.

Model Analitis Tata Kelola Stunting Berbasis Peran Pemerintah Daerah



Gambar 1. Model Analitis Tata Kelola Stunting Berbasis Peran Pemerintah Daerah

Tabel 7. Konsistensi Proposisi, Metode, Hasil, Pembahasan, dan Kesimpulan

Proposisi Analitis	Metode Pendukung	Temuan Utama	Pembahasan	Kesimpulan Konsistensi
Peran interpersonal menentukan koordinasi dan penerimaan sosial	Wawancara, observasi, dokumen TPPS/Rembuk/BAAS	Koordinasi formal ada, tetapi internalisasi keluarga belum optimal	Forum struktural perlu diubah menjadi komunikasi persuasif keluarga	Konsisten; hasil menjawab proposisi pertama.
Peran informasional menentukan respons berbasis data	Dokumen e-PPGBM, Elsimil, observasi posyandu	Data tersedia tetapi tindak lanjut tidak selalu cepat	Data harus menjadi dasar kunjungan rumah dan alokasi lintas sektor	Konsisten; ditemukan gap data-tindakan.
Peran keputusan menentukan alokasi dan inovasi	Dokumen program, data PMT/RDS/antropometri, wawancara OPD	Ada inovasi PMT lokal, BAAS, antropometri, tetapi terhambat sanitasi dan Anggaran	Keputusan perlu menyasar faktor lingkungan dan konsistensi sumber daya	Konsisten; kesimpulan menekankan kebutuhan tata kelola implementasi.

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa telah berjalan melalui pembentukan struktur koordinasi, pemanfaatan data, pelaksanaan program intervensi, serta pengalokasian dukungan anggaran. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat jarak antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan efektivitas pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya jumlah balita stunting di Kecamatan Bajawa, meskipun Kabupaten Ngada secara umum menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan program tidak selalu identik dengan keberhasilan implementasi apabila koordinasi, tindak lanjut data, dan keterpaduan intervensi belum berjalan secara konsisten.

Sama halnya dengan temuan (Kesuma et al., 2022), pelaksanaan kebijakan konvergensi stunting pada tingkat kabupaten umumnya telah didukung oleh regulasi, anggaran, dan arahan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya di tingkat kecamatan dan desa masih menghadapi persoalan komitmen, kapasitas pelaksana, dan koordinasi lintas aktor. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini karena Pemerintah Kabupaten Ngada telah memiliki perangkat kelembagaan dan program percepatan penurunan stunting, tetapi koordinasi di tingkat akar rumput belum merata. Dalam konteks Kecamatan Bajawa, peran pemerintah daerah tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya program, melainkan dari kemampuan program tersebut menjangkau keluarga sasaran secara tepat, cepat, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Handayani et al., 2023) yang menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan tata kelola berbasis sistem

terintegrasi di tingkat daerah. Menurut penelitian tersebut, penguatan konvergensi stunting perlu ditopang oleh kepemimpinan daerah, analisis data stunting, digitalisasi data, kesiapan informasi, serta keterbukaan tata kelola. Hal ini sejalan dengan temuan di Kecamatan Bajawa, di mana data e-PPGBM dan Elsimil sudah digunakan sebagai instrumen pendukung, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong respons intervensi yang cepat. Artinya, data digital baru memiliki nilai strategis apabila diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan pengawasan yang rutin dari pemerintah daerah.

Berbeda dengan asumsi bahwa pusat pemerintahan akan lebih mudah memperoleh layanan dan pengawasan, temuan penelitian ini justru menunjukkan adanya anomali di Kecamatan Bajawa. Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ngada, Bajawa seharusnya memiliki akses koordinasi dan layanan yang lebih dekat. Namun, jumlah balita stunting di wilayah ini tetap menjadi yang tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dengan pusat birokrasi tidak otomatis menghasilkan efektivitas kebijakan apabila proses manajerial dan koordinatif tidak berjalan sampai pada level keluarga sasaran. Dengan demikian, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh lokasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta konsistensi pelaksanaan intervensi.

Temuan ini juga berkaitan dengan hasil penelitian (Atamou et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam intervensi stunting sering kali masih bersifat *"mandated collaboration"*, yaitu kolaborasi yang diwajibkan oleh kebijakan, tetapi belum sepenuhnya tumbuh sebagai kerja bersama yang setara antaraktor. Dalam penelitian ini, koordinasi lintas sektor telah dilakukan melalui TPPS, perangkat daerah, puskesmas, posyandu, kader, dan pemerintah desa/kelurahan. Namun, kolaborasi tersebut masih cenderung bergantung pada struktur formal pemerintah. Artinya, keterlibatan aktor nonpemerintah, masyarakat, keluarga sasaran, dan mitra eksternal perlu diperkuat agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Andriani et al., 2025).

Sama halnya dengan temuan (Andriani et al., 2025), faktor pendorong percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten meliputi adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, alokasi anggaran, keterlibatan lintas sektor, serta peran kader dan tenaga kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut juga hadir di Kabupaten Ngada melalui pelaksanaan rembuk stunting, pemanfaatan data sasaran, pemberian makanan tambahan lokal, pembinaan kader, dan penguatan layanan posyandu. Namun, sebagaimana juga ditemukan oleh (Andriani et al., 2025) faktor penghambat tetap muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi teknis, keterbatasan kapasitas pelaksana, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting membutuhkan penguatan tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada aspek pelaksanaan teknis di lapangan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Putri et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan konvergensi stunting pada level lokal menghadapi tantangan

dalam hal integrasi program, keberlanjutan koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan di desa sasaran. Dalam konteks Kecamatan Bajawa, tantangan tersebut tampak pada belum meratanya koordinasi TPPS hingga level desa/kelurahan, belum cepatnya respons terhadap data e-PPGBM, serta belum kuatnya hubungan antara pemantauan data dan tindakan intervensi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konvergensi stunting tidak cukup dimaknai sebagai penggabungan program dari berbagai perangkat daerah, tetapi harus menjadi mekanisme kerja yang mampu menyatukan data, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam satu alur kebijakan yang berkelanjutan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama dalam penelitian ini adalah adanya anomali Kecamatan Bajawa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ngada, tetapi tetap menjadi wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa posisi administratif suatu wilayah tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan intervensi kebijakan. Apabila pemerintah daerah hanya membaca data secara agregat pada tingkat kabupaten, maka persoalan khusus di Kecamatan Bajawa berpotensi tidak terlihat secara tajam. Oleh karena itu, analisis stunting perlu dilakukan sampai pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, bahkan keluarga sasaran agar kebijakan tidak berhenti pada angka rata-rata kabupaten. Pemerintah daerah telah memanfaatkan data e-PPGBM dan Elsimil sebagai dasar pemantauan balita dan keluarga berisiko. Namun, data tersebut belum sepenuhnya menjadi sistem peringatan dini yang mendorong tindakan cepat. Dalam praktiknya, data masih cenderung berfungsi sebagai laporan administratif, bukan sebagai instrumen manajerial yang langsung mengarahkan intervensi. Temuan ini berbeda dari harapan ideal tata kelola berbasis data, di mana data seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan sasaran, bentuk bantuan, jadwal intervensi, dan evaluasi hasil program. Program ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan bantuan seragam dari luar, tetapi menyesuaikan intervensi dengan konteks lokal. Meskipun demikian, PMT lokal tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal. Efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan keluarga sasaran, keberlanjutan pendampingan kader, kualitas sanitasi, akses air bersih, pola asuh, serta pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara rutin (Laksono et al., 2024).

Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi dan menyediakan program, tetapi keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kader dan posyandu memiliki posisi strategis karena mereka lebih dekat dengan keluarga, mengetahui kondisi sosial warga, dan dapat memantau perubahan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader, dukungan operasional, dan sistem pelaporan yang sederhana menjadi faktor penting agar intervensi stunting dapat berjalan lebih efektif. Koordinasi lintas sektor sering kali sudah dilakukan melalui rapat, rembuk stunting, dan pembagian tugas antarperangkat daerah (Ashar et al., 2024). Namun, tantangan utama terletak pada kesinambungan pelaksanaan setelah rapat selesai. Koordinasi yang efektif seharusnya

menghasilkan pembagian tugas yang terukur, target keluarga sasaran yang jelas, jadwal intervensi, mekanisme pemantauan, serta evaluasi rutin. Tanpa hal tersebut, koordinasi berisiko menjadi kegiatan administratif yang tidak cukup kuat untuk mengubah kondisi keluarga berisiko stunting. Stunting tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga dengan cara keluarga memahami gizi, kebersihan, pola asuh, pemeriksaan kesehatan, dan pemanfaatan layanan posyandu. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah perlu menggabungkan bantuan material dengan edukasi yang berulang, komunikasi yang mudah dipahami, dan pendampingan yang konsisten. Apabila keluarga sasaran tidak mengalami perubahan perilaku, maka bantuan pangan maupun program kesehatan berisiko hanya memberi dampak sementara (Jokhu & Syauqy, 2024).

Adanya peluang memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal melalui program seperti Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi. Kolaborasi semacam ini penting karena stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak mungkin diselesaikan oleh dinas kesehatan saja. Namun, kolaborasi perlu dikelola secara hati-hati agar tidak hanya bersifat bantuan sesaat (Picauly et al., 2024). Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keterlibatan pihak eksternal masuk ke dalam desain program yang jelas, berbasis data sasaran, memiliki mekanisme pemantauan, dan tidak tumpang tindih dengan program perangkat daerah (Ratnayani et al., 2024). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa faktor penghambat utama percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa bukan semata-mata ketiadaan program, melainkan belum optimalnya keterpaduan antara data, koordinasi, keputusan, dan pelaksanaan intervensi. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah adanya komitmen pemerintah daerah, keberadaan TPPS, pemanfaatan data digital, pelaksanaan PMT lokal, peran kader dan posyandu, serta peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, rekomendasi penting dari penelitian ini adalah perlunya memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar setiap data balita stunting dan keluarga berisiko dapat segera diikuti oleh tindakan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Bajawa telah berjalan secara regulatif dan programatik, tetapi belum optimal secara implementatif. Pemerintah daerah telah membentuk struktur koordinasi, menggunakan data e-PPGBM dan Elsimil, menjalankan PMT lokal, menggerakkan BKB, melaksanakan Rembuk Stunting, mengembangkan BAAS, serta memperkuat antropometri. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya terhubung secara konsisten hingga tingkat keluarga sasaran. Anomali Kecamatan Bajawa menunjukkan bahwa kedekatan dengan pusat pemerintahan tidak otomatis menghasilkan capaian terbaik. Masalah utama bukan semata ketiadaan program, melainkan kesenjangan antara koordinasi formal dan perubahan perilaku keluarga, antara data dan respons lapangan, serta antara keputusan alokasi

sumber daya dan hambatan lingkungan seperti sanitasi, air bersih, dan kualitas pengasuhan. Dengan demikian, percepatan penurunan stunting di Bajawa membutuhkan tata kelola implementasi yang lebih presisi, lintas sektor, dan berbasis keluarga.

Secara teoritis, artikel ini menunjukkan bahwa Teori Peran Mintzberg dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan kesehatan publik di tingkat daerah. Peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan tidak berdiri sendiri, tetapi saling menentukan. Pemerintah daerah yang kuat secara simbolik belum tentu efektif apabila data tidak valid atau keputusan sumber daya tidak tepat. Sebaliknya, data yang kuat tidak berdampak apabila tidak ada kepemimpinan dan komunikasi yang mampu menggerakkan keluarga sasaran. Artikel ini juga menambahkan pembacaan baru terhadap studi stunting di Indonesia. Banyak penelitian berfokus pada determinan keluarga, ibu, anak, dan lingkungan. Penelitian ini menempatkan tata kelola implementasi sebagai jembatan antara determinan tersebut dan intervensi pemerintah daerah. Dengan demikian, stunting perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara risiko biologis, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Ngada, hasil penelitian ini menegaskan perlunya memperkuat manajemen konvergensi berbasis lokus. Bapperida perlu memastikan bahwa data e-PPGBM, Elsimil, dan data desa menjadi dasar prioritas anggaran lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu memperkuat integrasi antara posyandu, TPK, kader, dan pemerintah desa agar data keluarga berisiko segera ditindaklanjuti. Bagi pemerintah desa/kelurahan, terutama Desa Pape, prioritas tidak boleh berhenti pada PMT. Dana Desa perlu diarahkan secara konsisten untuk mendukung PMT lokal, sanitasi, air bersih, kunjungan rumah, dan penguatan RDS sebagai pusat edukasi keluarga. Kader perlu mendapat dukungan teknis dan sosial agar mampu melakukan komunikasi perubahan perilaku secara berulang. BAAS dan kemitraan eksternal dapat diperluas, tetapi harus tetap berbasis data sasaran dan pemantauan dampak. Bagi TPPS, forum koordinasi harus dievaluasi berdasarkan hasil di keluarga sasaran, bukan hanya kelengkapan rapat dan dokumen. Indikator kerja perlu mencakup kecepatan tindak lanjut setelah data muncul, proporsi keluarga yang mendapat kunjungan, perubahan praktik pengasuhan, perbaikan sanitasi keluarga, serta keberlanjutan akses pangan bergizi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian bersifat kualitatif dan berfokus pada Kecamatan Bajawa sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh Kabupaten Ngada atau wilayah lain. Kedua, artikel ini menggunakan data yang tersedia dalam skripsi dan dokumen pendukung; beberapa informasi rinci seperti jumlah informan akhir, tanggal wawancara, dan kutipan verbatim lengkap perlu dikonfirmasi oleh penulis sebelum submit. Ketiga, penelitian belum mengukur outcome biologis anak setelah intervensi secara longitudinal. Keempat, hubungan antara jenis intervensi tertentu dan penurunan kasus belum diuji secara kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian mendatang dapat diarahkan pada empat agenda. Pertama, studi longitudinal untuk menilai perubahan status gizi anak setelah PMT lokal, kunjungan rumah, dan perbaikan sanitasi. Kedua, studi komparatif antarkecamatan di Kabupaten Ngada untuk mengetahui mengapa beberapa wilayah lebih berhasil dibanding wilayah lain. Ketiga, evaluasi akuntabilitas Dana Desa dalam konvergensi stunting. Keempat, penelitian etnografis mengenai praktik pengasuhan, budaya makan, kepatuhan posyandu, dan penerimaan keluarga terhadap pesan kesehatan di wilayah Bajawa. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penggunaan Teori Peran Mintzberg dalam kajian kebijakan kesehatan daerah, khususnya untuk menjelaskan bagaimana peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan menentukan kualitas tata kelola stunting. Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Ngada perlu memperkuat manajemen konvergensi berbasis lokus, mempercepat tindak lanjut data e-PPGBM dan Elsimil, meningkatkan kualitas pendampingan keluarga, memperbaiki sanitasi dan air bersih pada wilayah rentan, serta memastikan program PMT lokal, BAAS, posyandu, kelas ibu hamil, BKB, dan intervensi hulu tidak berjalan terpisah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dosen pembimbing, Pemerintah Kabupaten Ngada, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan data, informasi, dan kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andriani, H., Arsyi, M., Sutrisno, A. E., Waits, A., & Rahmawati, N. D. (2025). Projecting the impact of a national strategy to accelerate stunting prevention in East Nusa Tenggara, Indonesia, using the Lives Saved Tool. *Narra J*, *5*(1), e1462. https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1462

Ashar, H., Laksono, A. D., Supadmi, S., Kusumawardani, H. D., Yunitawati, D., Purwoko, S., & Khairunnisa, M. (2024). Factors related to stunting in children under 2 years old in the Papua, Indonesia: Does the type of residence matter? *Saudi Medical Journal*, *45*(3), 273–278. https://doi.org/10.15537/smj.2024.45.3.20230774

Atamou, L., Rahmadiyah, D. C., Hassan, H., & Setiawan, A. (2023). Analysis of the determinants of stunting among children aged below five years in stunting locus villages in Indonesia. *Healthcare*, *11*(6), 810. https://doi.org/10.3390/healthcare11060810

Chapman, A. J., Ebido, C. C., Tening, R. N., Huang, Y., Sougou, N. M., Kolopaking, R., Diallo, A. H., Anggorowati, R., Dial, F. B., Massonnié, J., Firoozmand, M., Niang, C. E. H. A., & Harder, M. K. (2024). Creating culturally-informed protocols for a stunting

intervention using a situated values-based approach (WeValue InSitu): A double case study in Indonesia and Senegal. *BMC Public Health*, *24*(1), 987. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18485-y

Erlyn, P., Hidayat, B., Fatoni, A., & Saksono, H. (2021). Nutritional interventions by local governments as an effort to accelerate stunting reduction. *Jurnal Bina Praja*, *13*, 543–553. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.543-553

Fahmida, U., Pramesthi, I. L., Kusuma, S., Sudibya, A. R. P., Rahmawati, R., Suciyanti, D., Gusnedi, & Diana, A. (2024). Problem nutrients in diet of under-five children and district food security status: Linear programming analyses of 37 stunting priority districts in Indonesia. *PLOS ONE*, *19*(12), e0314552. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314552

Gusnedi, Nindrea, R. D., Purnakarya, I., Umar, H. B., Andrafikar, Syafrawati, Asrawati, Susilowati, A., Novianti, Masrul, & Lipoeto, N. I. (2023). Risk factors associated with childhood stunting in Indonesia: A systematic review and meta-analysis. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, *32*(2), 184–195. https://doi.org/10.6133/apjcn.202306_32(2).0001

Hamzah, M. Z., Sofilda, E., & Kusairi, S. (2024). How do socioeconomic indicators and fiscal decentralization affect stunting? Evidence from Indonesia. *International Journal of Development Issues*. https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2024-0150

Handayani, N. S., Huriyati, E., & Hasanbasri, M. (2023). Association of maternal education with nutritional outcomes of poor stunted children in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, *35*(5), 373–380. https://doi.org/10.1177/10105395231185980

Heidkamp, R. A., Piwoz, E., Gillespie, S., Keats, E. C., D'Alimonte, M. R., Menon, P., Das, J. K., Flory, A., Clift, J. W., Ruel, M. T., Vosti, S., Akuoku, J. K., & Bhutta, Z. A. (2021). Mobilising evidence, data, and resources to achieve global maternal and child undernutrition targets and the Sustainable Development Goals: An agenda for action. *The Lancet*, *397*(10282), 1400–1418. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00568-7

Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation outcomes of national convergence action policy to accelerate stunting prevention and reduction at the local level in Indonesia: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(20), 13591. https://doi.org/10.3390/ijerph192013591

Hermawan, A., Rifdan, Nurussyariah, & Yamin, M. N. (2026). Developing a collaborative governance model for stunting reduction in Jeneponto Regency. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, *6*, 24–30. https://doi.org/10.59065/jissr.v6i1.259

Indah, S., & Asnil, A. (2026). Evaluating stunting prevention policy advocacy at the sub-district level in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, *13*, 34–47. https://doi.org/10.18196/jgpp.v13i1.27996

Jokhu, L. A., & Syauqy, A. (2024). Determinants of concurrent wasting and stunting among children 6 to 23 months in Indonesia. *Nutrition*, *122*, 112390. https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.112390

Juniarti, N., Alsharaydeh, E., Sari, C. W. M., Yani, D. I., & Hutton, A. (2025). Determinant factors influencing stunting prevention behaviors among working mothers in West Java Province, Indonesia: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, *25*(1), 2719. https://doi.org/10.1186/s12889-025-24078-0

Keats, E. C., Das, J. K., Salam, R. A., Lassi, Z. S., Imdad, A., Black, R. E., & Bhutta, Z. A. (2021). Effective interventions to address maternal and child malnutrition: An update of the evidence. *The Lancet Child & Adolescent Health*, *5*(5), 367–384. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1

Kesuma, Z. M., Siregar, L. R., Fradinata, E., & Fathinah, A. (2022). Factors affecting stunting in children under 5 years of age in Indonesia using spatial model. *Indian Journal of Public Health*, *66*(3), 264–268. https://doi.org/10.4103/ijph.ijph_1989_21

Kusumajaya, A. A. N., Mubasyiroh, R., Sudikno, Nainggolan, O., Nursanyoto, H., Sutiari, N. K., Adhi, K. T., Suarjana, I. M., & Januraga, P. P. (2023). Sociodemographic and healthcare factors associated with stunting in children aged 6–59 months in the urban area of Bali Province, Indonesia 2018. *Nutrients*, *15*(2), 389. https://doi.org/10.3390/nu15020389

Kusumawardani, H. D., Laksono, A. D., Latifah, L., Hidayat, T., Pranata, S., & Nurcahyani, Y. D. (2024). The relation between maternal participation in pregnancy classes and early initiation of breastfeeding accomplishment in Indonesia: Evidence from a nationally representative survey. *Clinical Epidemiology and Global Health*, *30*, 101852. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101852

Laksono, A. D., Izza, N., Trisnani, T., Paramita, A., Sholikhah, H. H., Andarwati, P., Rosyadi, K., & Wulandari, R. D. (2024). Determination of appropriate policy targets to reduce the prevalence of stunting in children under five years of age in urban-poor communities in Indonesia: A secondary data analysis of the 2022 Indonesian National Nutritional Status Survey. *BMJ Open*, *14*(9), e089531. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-089531

Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Amaliah, N., & Wisnuwardani, R. W. (2022). Stunting among children under two years in Indonesia: Does maternal education matter? *PLOS ONE*, *17*(7), e0271509. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271509

Lautt, E. P., & Rahayu, A. Y. S. (2024). Integration of regional policies and collaborative governance in acceleration of stunting reduction: Case study of Bekasi City. *Jurnal Bina Praja*, *16*(4), 589–597. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.589-597

Mediani, H. S., Hendrawati, S., Pahria, T., Mediawati, A. S., & Suryani, M. (2022). Factors affecting the knowledge and motivation of health cadres in stunting prevention among children in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, *15*, 1069–1082. https://doi.org/10.2147/JMDH.S356736

Mubarok, A. M., Fatoni, A. M., Umam, K., & Arif, A. (2025). Local welfare governance and capability deprivation in stunting policy: A case study of the PMT program in rural Indonesia. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *14*(2). https://doi.org/10.14421/welfare.2025.142-03

Pardamean, B., Nirwantono, R., Hidayat, A. A., Trinugroho, J. P., Isnan, M., Rahutomo, R., Sudigyo, D., Asadi, F., Elwirehardja, G. N., Ariansyah, D., Sari, R., Pasaribu, R. D. U., Berlian, G., Ichwan, M., & Lumbanraja, S. N. (2024). Monitoring and evaluation of childhood stunting reduction program based on fish supplement product in North Sumatera, Indonesia. *Scientific Reports*, *14*(1), 11674. https://doi.org/10.1038/s41598-024-61462-z

Picauly, I., Adi, A. A. A. M., Meiyetriani, E., Mading, M., Weraman, P., Nashriyah, S. F., Boeky, D. L. A., Lobo, V., Saleh, A., Peni, J. A., Hidayat, A. T., & Marni, M. (2024). Determinants of child stunting in the dryland area of East Nusa Tenggara Province, Indonesia: Insights from a national-level survey. *Journal of Medicine and Life*, *17*(2), 147–156. https://doi.org/10.25122/jml-2023-0313

Putri, N. K., Wardhani, L. P., & Ernawaty. (2024). Positive deviance/hearth intervention in collaboration between academia and NGOs: A realist evaluation. *BMC Public Health*, *24*(1), 3598. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20632-4

Ratnayani, Hegar, B., Sunardi, D., Fadilah, F., Gunardi, H., Fahmida, U., & Vidiawati, D. (2024). Association of gut microbiota composition with stunting incidence in children under five in Jakarta slums. *Nutrients*, *16*(20), 3444. https://doi.org/10.3390/nu16203444

Rispati, M., & Inizawati, I. (2023). Government efforts to prevent stunting in North Kelarik Village. *Formosa Journal of Applied Sciences*, *2*, 3055–3062. https://doi.org/10.55927/fjas.v2i11.6892

Saharuddin, S., Irwan, A. L., Rahmatullah, R., Djalil, Abd. R., Saputra, I. A., Irwan, A. I. U., & Makalew, A. S. (2025). Local government strategies to achieve SDGs social development: Governance policy of stunting mitigation in Bantaeng Regency, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *15*, 55–71. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15123

Samosir, O. B., Radjiman, D. S., & Aninditya, F. (2023). Food consumption diversity and nutritional status among children aged 6–23 months in Indonesia: The analysis of the results of the 2018 Basic Health Research. *PLOS ONE*, *18*(3), e0281426. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281426

Sapri, S., Mardhatillah, M., & Ramlan, P. (2026). From coordination to convergence: A collaborative governance model for multi-sectoral stunting reduction in decentralized contexts. *Journal of Governance and Public Policy*, *13*, 48–59. https://doi.org/10.18196/jgpp.v13i1.28137

Sari, D. T. (2023). Government health expenditure and stunting prevalence reduction in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan/Jurnal Perencanaan Pembangunan*, *7*, 192–208. https://doi.org/10.36574/jpp.v7i2.452

Siramaneerat, I., Astutik, E., Agushybana, F., Bhumkittipich, P., & Lamprom, W. (2024). Examining determinants of stunting in urban and rural Indonesian: A multilevel analysis using the population-based Indonesian Family Life Survey (IFLS). *BMC Public Health*, *24*(1), 1371. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18824-z

Supadmi, S., Laksono, A. D., Kusumawardani, H. D., Ashar, H., Nursafingi, A., Kusrini, I., & Musoddaq, M. A. (2024). Factor related to stunting of children under two years with working mothers in Indonesia. *Clinical Epidemiology and Global Health*, *26*, 101538. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101538

Supranoto, Sasmito, L., Indriastuti, S., & Prayitno, H. (2025). From parallel to partnership governance: Strengthening institutional synergy for stunting reduction in decentralized Indonesia. *SSM - Health Outcomes*, *11*, 102051. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102051

Syahri, I. M., Laksono, A. D., Fitria, M., Rohmah, N., Masruroh, & Ipa, M. (2024). Exclusive breastfeeding among Indonesian working mothers: Does early initiation of breastfeeding matter? *BMC Public Health*, *24*(1), 1225. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18619-2

Victora, C. G., Christian, P., Vidaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: Variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, *397*(10282), 1388–1399. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9

Wiliyanarti, P. F., Wulandari, Y., & Nasrullah, D. (2022). Behavior in fulfilling nutritional needs for Indonesian children with stunting: Related culture, family support, and mother's knowledge. *Journal of Public Health Research*, *11*(4), 22799036221139936. https://doi.org/10.1177/22799036221139938

Yunitasari, E., Lee, B.-O., Krisnana, I., Lugina, R., Solikhah, F. K., & Aditya, R. S. (2022). Determining the factors that influence stunting during pandemic in rural Indonesia: A mixed method. *Children*, *9*(8), 1189. https://doi.org/10.3390/children9081189

Zhang, H., & Wang, W. (2023). A collaborative governance model in public management. *Frontiers in Sustainable Development*, *3*, 40–49. https://doi.org/10.54691/fsd.v3i4.4746